

**PERJALANAN DINAS – PEDOMAN
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 4 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalan dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru perlu adanya pedoman pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Dasar hukum : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
 2. Perjalanan Dinas Jabatan;
 3. Prinsip Perjalanan Dinas;
 4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
 5. Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas;
 6. Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas;
 7. Prosedur Pembayaran Perjalanan Dinas.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2013.

APBD 2013

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK

- : - Bahwa Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Bahwa berhubung sampai dengan tanggal 16 Maret 2013, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang telah diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Maluku guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang APBD Tahun Anggaran 2013.
- Dasar hukum : UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 110 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 37 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 85 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2011; Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 025/171/04/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun

STATUS : Anggaran 2013.
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 03 April 2013.

**UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 6 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG UANG PERSEDIAAN DAN
GANTI UANG PERSEDIAAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa guna kelancaran pelaksanaan program kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja dan pergantian uang persediaan (GU). Ketentuan Pasal 92 Ayat (1,4, dan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 198 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Uang Persediaan (UP) pada SKPD Tahun Anggaran 2013.
 - Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Uang Persediaan (UP) pada SKPD Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Penetapan Besaran;
 4. Tata Cara Penggunaan;
 5. Pembukaan dan Penutupan Rekening;
 6. Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan;
 7. Sanksi;
 8. Ganti Uang Persediaan;
 9. Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 16 April 2013.

**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 7 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG BADAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2013.**

- ABSTRAK** : - Bahwa penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran sebagai sektor terkait memerlukan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi nasional daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013.
- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; Kepres Nomor 4 Tahun 2009; Permendagri Nomor 50 Tahun 2009; Perda Nomor 1 Tahun 2006; Perda Nomor 2 Tahun 2006; Perda Nomor 3 Tahun 2006.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
- Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas Pokok dan Fungsi;
 3. Uraian Tugas;
 4. Tata Kerja;
 5. Pembiayaan;
 6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 25 April 2013.

**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – APBD
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 8 TAHUN 2013
2013**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Kepulauan Aru berwenang melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu adanya penetapan pedoman kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; Kepres Nomor 4 Tahun 2009; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 37 Tahun 2012.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Hibah;
 4. Bantuan Sosial;
 5. Monitoring dan Evaluasi;
 6. Lain-Lain;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 08 Mei 2013.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA – PENGESAHAN
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 11 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 pada ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.
- Dasar hukum : UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perbup Nomor 5 Tahun 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
 2. APBD Desa;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Penyusunan APBD;
 5. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2013.

**ALOKASI DANA DESA – PETUNJUK TEKNIS
PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 12 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2013**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memberikan arah dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar lebih tertib sesuai mekanisme yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Kepulauan Aru.
- Dasar hukum : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2006; Permendagri Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2013.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2013.

RKPD 2014

**PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 10 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 40 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 32 Tahun 2012; Perda Nomor 1 Tahun 2006; Perda Nomor 55 Tahun 2008; Perda Nomor 2 Tahun 2012; Perda Nomor 3 Tahun 2012; Perbup Nomor 5 Tahun 2013.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2013.